

TERORISME, NEGARA, DAN NOVEL INDONESIA

Aprinus Salam¹ dan Ramayda Akmal²

Intisari

Seberapa jauh novel-novel Indonesia merepresentasikan terorisme? Penelusuran terhadap pertanyaan tersebut membutuhkan adanya batasan dan ruang lingkup mengenai konsep terorisme. Selama ini ada semacam kerancuan, penyempitan, bahkan pemutarbalikkan makna berkaitan dengan apa itu terorisme. Tentu saja pemaknaan terhadap pengertian teror (terorisme) berpengaruh terhadap wacana teror di dalam novel-novel. Tulisan ini melakukan penelusuran terhadap beberapa novel untuk mengetahui mengapa wacana teror dihadirkan dalam bentuk-bentuk yang mungkin berlainan. Selain itu, apakah wacana teror itu sesuai dengan kehendak kekuasaan, ataukah secara implisit menegaskan makna-makna yang berbeda, akan menjadi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang berusaha dijawab tulisan ini.

1. Ruang Lingkup Terorisme di Indonesia

Terorisme dapat dipahami sebagai ancaman atau penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan politik, agama, atau lainnya dengan cara-cara intimidasi, menimbulkan ketakutan, dan sebagainya yang diarahkan terhadap penduduk atau warga negara tertentu.³ Berdasarkan pengertian itu, terorisme bisa dilakukan siapa saja, dalam bentuk beragam, dan demi motif yang berbeda-beda. Secara lebih rinci terorisme dibagi menjadi empat jenis, (1) *transnational organised crime* (kriminalitas yang beroperasi melintasi batas negara seperti perdagangan narkoba); (2) *state sponsored terrorism* (negara yang memberi dukungan terhadap tindakan teror); (3) *nationalistic terrorism* (gerakan di dalam negara yang mengacaukan ketertiban masyarakat seperti gerakan separatis); dan (4) *ideological terrorism* (teroris yang mendasarkan aksinya pada prinsip-prinsip ideologi).⁴

Di Indonesia, istilah teror dan terorisme mencuat seiring dengan gegernya dunia atas pengeboman WTC dan Pentagon, kemudian peristiwa bom Bali yang menikam jantung Indonesia sendiri. Pengertian teror yang dipahami oleh Indonesia seiring dengan peristiwa itu terpenjara pada segala yang berkaitan dengan Islam dan kelompok-kelompok militan garis kerasnya. Tindakan teror-teror selain *ideological terrorism*

¹ Dosen dan peneliti sastra di Fakultas Ilmu Budaya UGM, Yogyakarta.

² Peneliti sastra dan kebudayaan pada *Institute for Civil Empowerment (ICE)*, Yogyakarta.

³ Chomsky, 2003:49.

⁴ Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan, 2002: 307-308.

seperti yang dikategorikan Griffith di atas tidak tersentuh, bahkan mungkin tidak dipahami sebagai teror. Kondisi ini ternyata juga didukung dan dipelihara oleh pihak penguasa negara Indonesia untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka yang mungkin sekali diperoleh dan dipertahankan melalui cara-cara teror.

Tidak pernah ada yang menyinggung bahwa peraturan atau undang-undang pemerintah dapat menjadi teror. Terdakwa gembong narkoba adalah juga pelaku teror. Monopoli ekonomi dan pengadilan di Indonesia yang berlaku tidak proporsional dalam menangani kasus juga bentuk terorisme. Tindakan densus 88 menembak mati orang-orang yang diduga teroris adalah juga perlakuan teror. Demikian pula jika presiden seringkali mengeluh, maka ia tengah menjadi teroris bagi masyarakatnya karena keluhan-keluhannya akan menimbulkan kecemasan.

Teror yang dilakukan presiden ini adalah teror yang berbentuk wacana. Rasa pesimis atau sadisme yang terkandung di dalam ungkapan-ungkapan tersebutlah yang menimbulkan efek teror. Sadisme yang ada di dalamnya adalah jenis sadisme mental. Serangan sadistik ini menggunakan kekuatan kata-kata, bukan fisik. Sadisme mental dapat saja bersarang di balik bermacam tuturan yang tampaknya tidak menyakitkan hati: cercaan pertanyaan, senyum (sinis), dan pernyataan yang memojokkan.⁵ Jenis sadisme ini seringkali dilakukan di depan orang banyak dan karenanya jadi terasa sangat menyakitkan. Ini salah satu bentuk teror yang utama dan dasyat efeknya. Sayangnya, teror ini justru yang paling tidak disadari apalagi diantisipasi.

Biasanya, media berperan besar menyalurkan teror-teror ini kepada masyarakat. Media-media ini tunduk atau terpaksa ditundukan pihak-pihak yang berkuasa dan akhirnya ikut menyebarkan teror. Dengan menyampaikan berita-berita tertentu dan menyembunyikan yang lainnya, dengan membuat analisis-analisis yang memojokkan; dengan menggunakan kalimat, frase, atau klausa yang mencirikan sadisme mental, media telah berhasil menjadi pelaku teror.

Sama dengan media, teror yang paling memungkinkan terepresentasi di dalam novel adalah teror-teror wacana tersebut. Dengan mengindikasikan wacana-wacana di dalam novel apakah dapat dikatakan teror atau bukan, siapa pelakunya, dan untuk apa, maka akan diketahui apakah novel-novel Indonesia ada dalam bayang-bayang kekuasaan dan teror negara (pihak yang berkuasa) atau berusaha dengan berbagai cara untuk mencoba melawan wacana teror tersebut.

Kembali ke permasalahan terorisme, seperti yang berlaku pada umumnya, pengertian terorisme di Indonesia sangat subjektif dan dikendalikan oleh kekuasaan. Melihat historisitasnya, terorisme mulai dikenal pada akhir abad ke-18 terutama untuk menunjuk aksi-aksi anarkis dan kudeta di Eropa Barat, Rusia, dan AS. Pelaku kekerasan pada masa itu percaya bahwa cara paling efektif untuk melakukan perubahan politik revolusioner adalah dengan membunuh orang-orang yang sedang berkuasa. Selama kurun waktu 1865-1905, sejumlah raja, presiden, perdana menteri, dan pejabat pemerintahan terbunuh oleh penembakan atau serangan bom. Jadi, awalnya memang terorisme cenderung digunakan oleh kepentingan-kepentingan

⁵ Fromm, 2006: 410.

politik. Namun dalam perkembangannya teror digunakan secara masif untuk kepentingan-kepentingan lain. Demikian pula di Indonesia.

Pada saat pendudukan Belanda, maka yang layak disebut teroris adalah pemberontak-pemberontak yang adalah pejuang Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, maka yang disebut teroris adalah kelompok-kelompok separatis yang hendak menodai integritas Indonesia. Kini, teroris adalah orang-orang yang berusaha merongrong ideologi Pancasila, orang-orang Islam berjenggot dan membawa bom. Pengertian ini bisa dikatakan benar. Tapi tidak hanya itu. Selain untuk menyebutkan tindakan makar terhadap negara, teror juga bisa dilakukan oleh negara kepada rakyatnya (*state terrorism*) Teror ini bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak. Tidak langsung dimaksudkan untuk mengkategorikan tindakan negara dalam mendukung aksi terorisme kelompok tertentu. Sayang sekali, seringkali aksi teror yang dilakukan negara tidak pernah disebut teror. Tindakan itu dianggap sebagai tindakan yang dimaksud untuk menjamin ketaatan rakyat. Itu adalah tindakan yang baik. Sekali lagi, yang berkuasa akan selalu benar dan yang akan menciptakan kebenaran.

Dalam kondisi yang demikian, bagaimanakah kehadiran novel-novel dan wacana-wacana berkaitan dengan teror yang ada di dalamnya direpresentasikan? Di bawah ini akan diuraikan wacana terorisme dalam beberapa sampel novel sejak Indonesia mengenal novel modern hingga kini. Tentu saja, pembahasan ini tidak pernah terlepas dari konteks sosial politik yang melingkupi kehadiran novel tersebut. Setidaknya ada lima rezim politik di Indonesia yang mungkin mempengaruhi keberadaan wacana-wacana teror di dalam novel, antara lain, masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, masa kemerdekaan (revolusi), rezim Orde Baru, dan pasca Orde Baru.

2. Teror(isme) dalam Novel-Novel Indonesia

Pada masa akhir kolonialisme Belanda, Indonesia mengenal bentuk novel modern berbahasa Melayu Tinggi dengan ditandai terbitnya novel *Azab dan Sengsara* karya Merari Siregar pada tahun 1921.⁶ Seperti diketahui bahwa pemerintah kolonial mengatur kehidupan kesusastraan agar sesuai dengan dan mendukung kekuasaan mereka. Mereka menetapkan bahwa karya sastra adalah karya yang menggunakan bahasa Melayu Tinggi, sedangkan karya-karya yang menggunakan bahasa selain itu dianggap bukan karya sastra. Dalam perkembangannya, bacaan-bacaan yang bukan sastra itu dianggap potensial ‘merusak akhlak dan membahayakan’, dan akhirnya dilarang.

Pemerintah kolonial membentuk Balai Pustaka dan kemudian juga Pujangga Baru sebagai alat pengendali kesusastraan baik secara represif maupun hegemonik. Tindak represif terutama dilakukan oleh Balai Pustaka karena mereka berhak menentukan mana karya sastra yang bisa terbit dan mana yang tidak bisa terbit. Sementara itu, ideologi kolonial lebih bekerja secara hegemonik terhadap kelompok yang tergabung dalam redaksi majalah Pujangga Baru.

⁶ Foulcher, 1991: 3.

Kondisi yang demikian sebenarnya dapat diartikan sebagai teror terhadap sastrawan Indonesia sendiri. Akan tetapi, karena teror tersebut meresap dengan halus dan terselip dalam tawaran baik politik etis maka keberadaannya sulit dideteksi bahkan tidak disadari. Maka, setelah *Azab dan Sengsara* bermunculanlah novel-novel yang kelak dianggap kanon dalam dunia kesusastraan Indonesia. Salah satu yang terpenting adalah novel *Sitti Nurbaya* karya Marah Rusli.

Wacana atau tindakan-tindakan yang secara jelas terdefiniskan sebagai teror sedikitpun tidak terungkap dalam novel *Sitti Nurbaya*. Walaupun sesungguhnya, begitu banyak tindakan, keterangan, dan *statement-statement* yang berada dalam lingkup konsep terorisme di dalam novel tersebut. Sebagai contoh, Syamsul Bahri, sebagai bagian dari militer Belanda merasa begitu bangga dan bernafsu menumpas pemberontak. Novel *Sitti Nurbaya* sepenuhnya memaparkan bahwa pemerintahan yang sah di Indonesia kala itu adalah pemerintahan Belanda, sementara pejuang-pejuang Indonesia yang berusaha merebut kekuasaan dianggap pemberontak dan oleh karena itu dapat diklasifikasikan sebagai teroris.

Ironisnya lagi, pejuang Indonesia yang disebut pemberontak itu terwakilkan oleh seseorang yang bertabiat jahat dan dibenci masyarakat, yakni Datuk Maringgih. Jadilah, pejuang Indonesia itu payah, tidak berbudi, dan amoral seperti Datuk Maringgih. Dia memberontak dan patut dienyahkan. Dalam koridor ini, Datuk Maringgih adalah teroris yang mengancam kedaulatan Belanda di Indonesia. Jika dilihat secara keseluruhan, maka wacana teroris yang dimunculkan masih sekitar *nationalistic terrorism*, yakni teror yang mengancam negara. Sementara tindakan-tindakan Belanda kepada rakyat Indonesia, sepenuhnya baik dan jauh dari teror.

Pada tahun 1942, Indonesia akhirnya diduduki oleh Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang ini sensor terhadap kesusastraan sudah tidak bersifat kolonial lagi, terbukti dari terbitnya novel-novel yang “melawan Belanda”.⁷ Jepang ingin merebut simpati Indonesia dengan menempatkan diri sebagai pahlawan yang membantu mengusir Belanda. Pemerintah Jepang mendirikan satu lembaga yang disebut Pusat Kebudayaan atau *Keimin Bunka Shidoso*⁸ untuk menghimpun tenaga sastrawan dan seniman, agar mereka dapat dimanfaatkan bagi kepentingan perang Asia Timur Raya. Lembaga ini melaksanakan sensor keras terhadap penerbitan, menghasilkan karya sastra yang sejalan dengan “pesanan” pemerintah, sehingga dalam berbagai karya sastra yang dihasilkan, unsur propaganda tidak dapat dielakkan.

Bahkan, pemerintahan Jepang tidak lagi mengadakan sensor, melainkan menciptakan suatu kontrol total. Hampir semua bidang, mulai dari film sampai nyanyian, digunakan oleh tentara pendudukan demi kepentingan propaganda. Hal itu berarti disingkirkannya semua alternatif, tidak jarang dengan kekerasan. Berdasarkan kenyataan ini, jelas bahwa tidak ada wacana teror yang mungkin berlainan dengan apa yang diwacanakan oleh Jepang. Teror selalu akan dimaknai sebagai Belanda, Barat,

⁷ Sumardjo, 1999:119.

⁸ Lembaga ini diketuai oleh Armyun Pane dengan penasihat Jepang bernama *Sakai*. Anggotanya antara lain, Sutomo Jauhar Arifin, Usmar Ismail, dan Inu Kertapati. Lihat, Jassin. 1975. *Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 3-4.

kemalasan, kepengecutan, dan hal lain yang berlawanan dengan ideologi pemerintahan Jepang.⁹

Diantara dua novel yang berhasil terbit salah satunya adalah *Cinta Tanah Air* karangan Nur St. Iskandar. Amirrudin, tokoh utama dalam *Cinta Tanah Air* begitu takjubnya kepada kehebatan tentara Jepang, baik itu Seinendan, Keibodan, maupun Heiho.¹⁰ Ia heran melihat keberanian dan ketenangan tentara Dai Nippon ketika menyerang dan berjuang. Ia takjub memikirkan kerelaan hati dan ketebalan semangat AU menumbukkan pesawat terbang kepada sasarannya (semangat bushido). AU Dai Nippon menghancurluluhkan armada Amerika di Pearl Harbour. Balatentara Jepang juga menyerang dan menggasak Hongkong, sampai kekuatan Inggris yang ada disana habis binasa. Jepang juga melakukan penyerbuan ke tanah Melayu dan Singapura untuk memusnahkan benteng Sekutu. Bala tentara Dai Nippon tak mau mundur, bahkan tak tahu arti mundur.¹¹

Apa yang dipaparkan tentang tentara Jepang dalam novel ini sebetulnya sarat dengan tindak terorisme. Tindakan kekerasan, pengeboman, dan pembantaian yang dilakukan Jepang memang dihadirkan untuk menimbulkan efek takut dan kagum sekaligus terhadap rakyat Indonesia. Akan tetapi, teror yang demikian malah dianggungkan dan dianggap sebagai harapan besar. Apalagi ditengah-tengah keputusan rakyat Indonesia yang telah diteror penjajahan Belanda selama beratus-ratus tahun, kehadiran Jepang dan terornya menjadi semangat baru dalam diri rakyat Indonesia.

Jadi, apa yang terjadi pada novel dan wacana teror di dalamnya pada saat zaman kolonial terulang lagi pada novel yang terbit di zaman Jepang. Teror yang ditampilkan adalah *nationalic terrorism*. Tidak ada wacana teror yang lain, apalagi teror-teror yang dilakukan oleh penguasa-penguasa pada waktu itu (Belanda dan Jepang) yang dalam kenyataannya dominan dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Wacana itu tidak akan sempat muncul di tengah ketatnya kontrol penguasa. Hal ini juga menunjukkan betapa karya sastra, khususnya novel, begitu terkooptasi dengan kekuasaan.

Setelah merdeka, Indonesia memasuki masa pemerintahan di bawah Soekarno. Pemerintahan Soekarno mendapat dukungan dan memiliki haluan yang mengekor pada negara-negara sosialis di Eropa dan Asia Timur. Segala hal yang berbau imperialisme dan Barat dalam kehidupan masyarakat Indonesia ditentang tegas. Kedekatan Soekarno dengan negara-negara sosialis Eropa Timur ini berimplikasi pada banyak hal. Salah satunya kehidupan pers dan karya sastra. Segala buku (karya sastra) yang berasal atau berbau Barat dilarang terbit dan dibredel bagi yang sudah terbit.

Teror pada masa ini berganti elemennya menjadi segala yang berbau penjajah dan penjajahan oleh Belanda dan Jepang, segala ideologi kebarat-baratan yang bertentangan dengan semangat revolusi, dan segala yang bertentangan dengan sosialisme. Secara serempak, novel-novel mewacanakan semangat revolusi dan

⁹ Fauzan, 2003: 97.

¹⁰ Iskandar, 1963: 11, 21, 72.

¹¹ Iskandar, 1963: 44-45, 77.

kemerdekaan. Orang-orang seperti Syamsul Bahri, jika hidup pada masa revolusi ini maka yang tadinya dia seorang pahlawan maka ia akan berubah menjadi penjahat, menjadi teroris. Wacana yang demikian diceritakan secara apik dalam novel *Perburuan* (1950) karya Pramoedya Ananta Toer.

Tokoh Hardo dalam novel *Perburuan* adalah seorang shodanco PETA. Namun, ia tidak bisa mengendalikan diri melihat kekejaman Jepang kepada bangsanya, sehingga ia bersama tiga orang *shodanco* lain yang membawa shodan-nya masing-masing memutuskan untuk memberontak.¹² Dari cerita ini dapat diperoleh satu perbedaan dari wacana teror pada novel-novel masa sebelumnya. Dalam *Perburuan*, pelaku teror itu justru negara (*state terrorism*), yakni Jepang. Mereka menyakiti rakyat dan harus dilawan dengan pemberontakan. Dan pemberontakan ini tidak dikatakan teror lagi.

Akan tetapi, salah satu teman Hardo, yaitu Karmin melakukan pengkhianatan sehingga pemberontakan Hardo gagal. Tokoh karmin ini, dalam ideologi revolusi pemerintahan Soekarno dapat disebut teroris, karena ia mengkhianati revolusi. Oleh karena perbuatan Karmin, Hardo pun diburu-buru Jepang dan bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Dalam persembunyiannya itu, ia menemukan kenyataan begitu banyak orang-orang yang berkhianat padanya, orang-orang yang tunduk pada Jepang, yang pengecut dan pecundang. Namun, ia tetap mempertahankan prinsipnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memaafkan orang-orang yang telah berkhianat.

Atas perjuangannya menentang Jepang itu, Hardo menjadi dihormati oleh rakyat kecil. Bahkan kelihaiannya berkelit dari buruan Jepang membuat orang-orang yakin dia memiliki ilmu gaib. Rakyat yang menderita oleh siksaan Jepang memandang pemberontakan Hardo sebagai perwakilan perasaan mereka. Perbuatan Hardo adalah perbuatan sejati.¹³

Dari kisah Hardo ini diperoleh gambaran baru bahwa yang menjadi teroris adalah negara dan oknum-oknum di sekitarnya. Rakyat yang terwakili dalam pemberontakan Hardo menjadi pihak yang benar dan berani melawan teror tersebut. Ada semacam proses pembalikkan dalam memaknai teror. Selain itu teror yang diwacanakan juga mulai bervariasi, tidak hanya teror oleh atau kepada negara, tetapi juga teror dari pengkhianat, teror dari oportunistis, dan sebagainya.

Akan tetapi, seperti novel-novel terdahulu, novel *Perburuan* juga tidak mengubah posisinya dalam hubungannya dengan kekuasaan. Novel ini masih sangat terkooptasi dengan ideologi-ideologi penguasa. Memang, teror yang dipaparkan adalah teror dari negara, tetapi negara masa lalu. Novel ini tidak menyentuh teror-teror mutakhir yang terjadi pada masa novel itu terbit. Novel ini menyuarakan apa yang terucap dari mulut Soekarno. Jadi, meski dalam beberapa aspek terdapat perbedaan, novel *Perburuan* ini masih sama seperti halnya *Sitti Nurbaya* atau *Cinta Tanah Air*. Teror menurut novel adalah teror menurut negara (kekuasaan).

¹² Toer, 1955: 59.

¹³ Toer, 1955: 20, 23, 26.

G30S/PKI pada 1965 menjadi awal perubahan politik di Indonesia. Dua tahun sesudahnya, Soekarno resmi mundur dari jabatan presiden dan digantikan oleh Soeharto. Mulailah suatu masa yang disebut Orde Baru. Tindakan awal pemerintahan Orba adalah ‘membersihkan’ segala macam unsur dari PKI. Hal ini juga berlaku di ranah kesusastraan. Tidak hanya secara fisik, namun juga pikiran bahwa tekanan pemerintah telah membuat perubahan besar terhadap identitas dan ideologi kesusastraan Indonesia.

Pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang otoriter dan militeristik. Sejak awal, militer mengambil peranan penting dalam rangka menjaga ‘stabilitas nasional’. Sebuah badan bernama Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang dibentuk tanggal 10 Oktober 1965 adalah badan yang berwenang besar untuk melakukan apapun dengan alasan memulihkan keamanan. Berkaitan dengan buku (karya sastra), dalam waktu singkat diperkirakan buku yang dilarang mencapai 2000 judul oleh badan tersebut dengan berbagai macam kriteria pelarangan.¹⁴

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka dapat dibayangkan, siapa saja yang bisa dianggap melakukan teror dan teroris. Saking luasnya kriteria yang diberlakukan Orde Baru membuat segala yang dianggap membahayakan pemerintahan dapat dianggap teroris. Terutama bagi pihak-pihak yang melawan atau membangkang dalam melestarikan ideologi dan jargon-jargon pemerintah seperti pembangunan, stabilitas nasional, dan Pancasila serta UUD 1945.

Novel yang nyaris sempurna merepresentasikan ideologi kekuasaan Orde Baru adalah novel *Pergolakan* karya Wildan Yatim. Tugas negara yang terwakilkan militer pada novel itu tidak lagi mengusir penjajah atau berperang, tetapi membasmi pemberontak. Pemberontak disini, seperti PRRI dan PKI adalah sekelompok orang yang dianggap melawan dan memiliki ideologi yang bertentangan dengan pemerintah. Jadi, pemberontak-pemberontak ini dapat digolongkan sebagai pelaku *ideological terrorism*.

Dalam novel ini diceritakan pasukan pemerintah membebaskan desa dari pemberontakan PRRI dengan membakar rumah-rumah penduduk tempat pemberontak bersarang. Mereka mengungsi, dan *tentara yang mengawal menangkap dan menempelengi mereka sehingga semua orang berjalan merunduk dengan jari dan bibir gemetar pasi*.¹⁵ Namun, tindakan kekerasan tentara ini tidak dinilai sebagai suatu kekejaman apalagi teror. Bagi masyarakat ini adalah tindakan yang benar.

¹⁴ Beberapa kriteria yang digunakan untuk melakukan pelarangan, antara lain: Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; Mengandung dan menyebarkan ajaran atau paham Marxisme, Leninisme/Komunisme; Merusak persatuan dan kesatuan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia; Merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional; Merusak akhlak dan memajukan pencabulan/pornografi; Memberikan kesan anti-Tuhan, anti agama dan penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia, sehingga merupakan penodaan dan merusak kerukunan hidup beragama; Merugikan dan merusak pelaksanaan pembangunan yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai; Menimbulkan pertentangan SARA; Bertentangan dengan GBHN, dan lain-lain . Lihat JKB, 1999: 27 dan 42.

¹⁵ Yatim, 1974: 91-92.

Setelah pemberontakan PRRI berhasil dilumpuhkan, dalam novel ini diceritakan PKI mulai mengembangkan sayapnya. Bahkan, melalui pasukan “dewan Banteng” mereka mulai melatih murid-murid SMP ilmu baris-berbaris dan perang-perangan. Masyarakat tidak menyukai orang-orang PKI karena sebagian besar mempunyai sikap yang tidak baik. Mereka penjudi, tukang bual, dan kikir. Tidak ada yang mau bersaudara dengan orang palu arit, termasuk Guru Salam dan teman-temannya. Mereka suka menfitnah, menuduh, dan melakukan kekerasan.¹⁶

Jadi, PKI dalam novel ini betul-betul dicirikan layaknya gerombolan teroris. Penggambaran tentang persiapan pasukan, sikap-sikap, dan rencana-rencana PKI semua diarahkan pada terorisme. Kemudian, novel ini juga memperlihatkan hubungan negara-rakyat-militer yang sangat harmonis dalam rangka menumpas pemberontakan PKI ini. Oleh karena PKI kejam tidak beragama, sewenang-wenang, dan banyak merugikan kehidupan rakyat maka kekejaman yang dilakukan terhadap mereka adalah sah.

Wacana teror yang dominan dalam novel Orde Baru adalah *ideological terrorism*, yang kemudian berkaitan dengan teror-teror lain yang ditimpakan kepada penduduk sipil. Selain novel yang terbit pada masa Jepang, novel-novel pada masa Orde Barulah yang paling tunduk pada kekuasaan negara, paling terkooptasi, dan karena itu wacana-wacana yang dihadirkan nyaris seragam.

Setelah Orde Baru runtuh, Indonesia memasuki masa yang disebut reformasi. Pada masa ini terjadi perubahan besar dalam hampir seluruh sistem kenegaraan dan pemerintahan, yang juga menjadi perubahan bagi kehidupan masyarakat yang selama ini diatur olehnya. Ketika perilaku represif pemerintah (militer) melemah, bahkan diupayakan untuk hilang sama sekali (khususnya dalam dunia kesusastraan), karya sastra menemukan fungsi hakikinya kembali. Karya sastra bebas menyuarakan apapun. Berbagai wacana, baik yang bertentangan maupun yang saling mendukung, hadir dalam karya sastra. Demikian pula dengan wacana teror dalam novel-novel.

Dalam novel *Saman* (1998) dan *Larung* (2001) karya Ayu Utami, wacana teror begitu mendominasi. Teror datang dari siapa saja dan dengan maksud yang berbeda-beda. Tetapi sasaran teror mereka selalu rakyat kebanyakan. Teror datang dari militer yang mewakili negara, dari perusahaan-perusahaan besar, dari pejabat-pejabat dan institusinya, dari praktik korupsi, perselingkuhan, perzinahan, dan dalam bentuk penculikkan, pembakaran, pemfitnahan, penghasutan, bahkan pembunuhan.

Teror dalam novel ini tidak terpusat pada satu pihak, walaupun secara tersirat, ada semacam keberpihakan penulis kepada rakyat kecil dan menyudutkan negara serta para pemilik modal. Jadi, samar-samar, dari sekian banyak teror yang diwacanakan, teror dari negara kepada rakyatnya (*state terrorism*) tampak lebih dominan. Kekejaman militer mewakili kekejaman negara, pembakaran desa oleh pengusaha adalah atas izin dan kerjasama dengan negara, praktik korupsi dan pemfitnahan dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, dan negara juga bertanggungjawab terhadap pembunuhan-pembunuhan aktivis.

¹⁶ Yatim, 1974: 86, 101, 106, 109, 112, 124.

Apa yang dipaparkan dalam kedua novel ini mewakili gejala di beberapa novel lainnya yang terbit dalam kurun waktu bersamaan. Jadi, wacana teror yang diangkat lebih bervariasi dan lebih dekat dengan realitas yang ada dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, satu ganjalan besar masih terlihat di tengah keberhasilan dan keberagaman novel pasca Orde Baru merepresentasikan teror, yakni seperti halnya novel-novel pada zaman revolusi, novel pada pasca Orde Baru juga masih mewacanakan teror atau negara di masa lalu. Kenyataan ini mengindikasikan kemungkinan bahwa negara pada masa sekarang masih merepresi novel-novel sehingga wacana kekinian tentang negara dan teror-teror tidak terepresentasi dengan maksimal. Kondisi ini dikuatkan dengan ketiadaannya penceritaan tentang teror-teror ideologis kelompok militan agama Islam yang justru kini menjadi wacana dominan di masyarakat Indonesia. Indikasi berikutnya, teror yang ada di Indonesia kini begitu mencekam sehingga sastrawan sulit terbuka membicarakannya karena takut terhadap efek-efek yang bisa terjadi karenanya.

Jika demikian, novel sejak kemunculannya hingga kini, tidak pernah terlepas dari kooptasi kekuasaan. Mungkin kadar keterikatan dan nilai-nilai yang diutarakan bisa berbeda-beda, tetapi hubungannya dengan kekuasaan tidak pernah terputus. Begitu pula dengan wacana teror yang diungkapkannya. Tidak pernah meleset dan menyimpang dari definisi-definisi yang diinstruksikan negara.

3. Kesimpulan

Tulisan ini ingin menegaskan kembali bahwa pengertian teror yang dipahami masyarakat Indonesia masih terbatas dan terdikte oleh kepentingan penguasa. Kondisi ini juga tercermin di dalam novel-novelnya. Bahkan, apa yang sebenarnya teror tidak pernah terpahami dengan baik oleh masyarakat-masyarakat di dalam novel sejak dulu hingga kini, karena baik sastrawan maupun pembacanya, tidak memahami dan menempatkan peristiwa itu sebagai teror. Mereka sepenuhnya terhegemoni oleh pengertian dari negara. Apalagi ketika pengertian teror seolah dibakukan hanya untuk menyebut aksi-aksi pemboman yang dilakukan kelompok-kelompok Islam garis keras. Pemahaman tentang teror yang sebenarnya menjadi semakin jauh.

Seandainya pun *ideological terrorism* yang dilakukan kelompok Islam ini dimengerti oleh masyarakat, mereka *toh* tidak bisa berbuat banyak. Mungkin sastrawan merasa sangat tidak nyaman menuangkan teror-teror seperti ini di dalam novelnya. Sampai kini, tidak ada novel yang secara "terbuka" mewacanakan teror dari pria-pria berjenggot dan berjubah ini. Karena begitu besar ketakutan yang tercipta dari "mereka", apalagi negara mengelolanya dalam strategi "standar ganda". Sementara itu, teror-teror yang lain, teror-teror di bidang ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan semakin merajalela, tidak disadari, dan terus tumbuh menjadi bahaya laten yang bisa menghancurkan Indonesia dan Pancasila.

Daftar Pustaka

- Chomsky, Noam. 2003. *Power and Terror: Post-9/11 Talks and Interviews*. New York: Seven Stories Press.
- Fauzan. 2003. *Mengubur Paradaban. Politik Pelarangan Buku di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Foulcher, Keith. 1991. *Pujangga Baru Kesusastraan dan Nasionalisme di Indonesia 1933-1942*. Jakarta: Girimukti Pasaka.
- Fromm, Erich. 2006. *Akar Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Griffiths, Martin dan Terry O'Callaghan. 2002. *International Relations: The Key concept*. London: Routledge.
- Jaringan Kerja Budaya (JKB). 1999. *Menentang Peradaban, Pelarangan Buku di Indonesia*. Jakarta: ELSAM.
- Sumardjo, Jakob. 1999. *Konteks Sosial Novel Indonesia 1920-1977*. Bandung: Penerbit Alumni.

Novel-Novel

- Iskandar, Nur St. 1963. *Cinta Tanah Air* (Cet. 4). Jakarta: Balai Pustaka.
- Rusli, Marah. 1990. *Sitti Nurbaya* (cet.20). Jakarta: Balai Pustaka.
- Toer, Pramudya Ananta. 1955. *Perburuan* (cet.2). Jakarta: Balai Pustaka.
- Utami, Ayu. 2002. *Larung* (cet.2). Jakarta: KPG.
- Utami, Ayu. 2002. *Saman* (cet.20). Jakarta: KPG.
- Yatim, Wildan. 1974. *Pergolakan*. Jakarta: Pustaka Jaya.